

---

## POLITIK INDONESIA PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN 1959-1966

**Ketut Sedana Arta**

Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Pendidikan Ganesha

Email: [ketut.sedana@undiksha.ac.id](mailto:ketut.sedana@undiksha.ac.id)

---

### Artikel info

#### Keywords:

*Demokrasi Terpimpin, PRRI, Permesta*

**Abstract.** This paper aims to explore and examine the political situation that occurred during Demokrasi Terpimpin period which lasted from 5 July 1959 to 11 March 1966. The method used in this paper is a historical research method. The results of this study indicate that the background of the implementation of Demokrasi Terpimpin is a dangerous state situation marked by major rebellions such as PRRI and Permesta and the situation of the Liberal Democracy period which was marked by the ups and downs of the cabinet, as well as the failure of the constituents to make a new constitution, the failure of the constituents to accept the proposals. President Sukarno to return to the 1945 Constitution. In its development Demokrasi Terpimpin made the presidential power very large because the representatives sitting in state institutions were appointed directly by the president as assistants to the president. The politics of confrontation also colored Indonesian politics, such as the Tri Kora, Dwi Kora, Indonesia's expulsion from the United Nations membership and the events of the September 30, 1965 Movement which resulted in the killing of Pahlawan Revolusi.

**Abstrak.** Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji dan menelaah situasi politik yang terjadi pada masa Demokrasi Terpimpin yang berlangsung dari 5 Juli 1959-11 Maret 1966. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian sejarah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang dari diberlakukannya Demokrasi Terpimpin adalah situasi negara yang berbahaya yang ditandai adanya berbagai pemberontakan besar seperti PRRI dan Permesta dan situasi pemerintahan masa Demokrasi Liberal yang ditandai jatuh banggunya kabinet, serta gagalnya Konstituante membuat UUD yang baru, gagalnya konstituante menerima usulan Presiden Sukarno untuk kembali ke UUD 1945. Dalam perkembangannya Demokrasi Terpimpin membuat kekuasaan presiden menjadi sangat besar karena wakil-wakil yang duduk di Lembaga-lembaga negara ditunjuk langsung oleh presiden sebagai pembantu presiden. Politik konfrontasi juga mewarnai politik Indonesia seperti adanya Tri Kora, Dwi Kora, keluarnya Indonesia dari keanggotaan PBB serta adanya peristiwa Gerakan 30 September 1965 yang menyebabkan terbunuhnya Pahlawan Revolusi.

---

#### Corresponden author:

Email: [ketut.sedana@undiksha.ac.id](mailto:ketut.sedana@undiksha.ac.id)

---

#### Pendahuluan

Menulis sejarah nasional bukan sekedar kegiatan intelektual atau akademis, tetapi juga kegiatan yang bermakna politis. Berbagai klaim mengenai usul, kedaulatan wilayah, legitimasi pemegang kekuasaan, status pahlawan nasional, siapa musuh dan

siapa korban, peran atau nasib penghianat dan penjahat, siapa kaum elite dan kelompok tersisih, sudah lama menjadi pokok perdebatan sejarah, baik bagi pelaku politik maupun sejarawan.<sup>1</sup> Demikian

---

<sup>1</sup> Henk Schulte Nordholt, Bambang Purwanto, dan Ratna Saptari. *Memikir Ulang Historiografi*

halnya ketika membahas tentang Demokrasi Terpimpin perlu dikaji dan ditelaah secara kritis terkait latar belakang diberlakukannya demokrasi tersebut, sehingga diperoleh penjelasan sejarah yang kritis analitis.

Meminjam pemikiran dari Arta dan Margi (2014) dijelaskan bahwa Demokrasi Terpimpin adalah sebuah demokrasi yang seluruh keputusan serta pemikiran terpusat pada pemimpinnya saja. Lebih lanjut dijelaskan pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Sukarno memberlakukan Dekrit Presiden yang berisikan tentang pembubaran konstituante, berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950 serta pembentukan MPRS dan DPA.<sup>2</sup> Keberhasilan diberlakukannya Dekrit Presiden tidak bisa dilepaskan dari dukungan politik dari partai-partai besar seperti PNI dan PKI serta yang tidak kalah pentingnya adalah dukungan militer yang dalam hal ini dukungan dari KASAD Jenderal Abdul Haris Nasution. Asvi Varwan Adam memberikan analisisnya bahwa ada kepentingan ABRI dalam perpolitikan supaya memiliki landasan hukum yang kuat sehingga mendukung berlakunya kembali UUD 1945. Nasution juga melakukan serangkaian tindakan strategis lainnya seperti merumuskan konsep politik tentara yang disebut sebagai konsep jalan tengah yang kemudian menjadi inti Dwi Fungsi ABRI.<sup>3</sup>

Proses Demokrasi Terpimpin dalam pelaksanaannya mengarah pada kekuasaan Presiden Sukarno yang sangat dominan dalam perpolitikan di Indonesia. Pelaksanaan demokrasi tersebut mengalami penyimpangan dari tujuannya

semula, yakni untuk menata kehidupan berbangsa dan bernegara akibat carur-marutnya kehidupan politik pada masa demokrasi liberal. Cita-cita Sukarno untuk menyatukan tiga ideologi (Nasionalis, Agama dan Komunis) dapat direalisasikan pada masa Demokrasi Terpimpin, walaupun ide tersebut sudah dimiliki ketika masa pergerakan nasional.<sup>4</sup> Penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Presiden Sukarno terjadi karena sistem yang dibuat dan didukung oleh PNI dan PKI, dua partai ini bisa diterima karena ada kepentingan masing-masing. PKI menurut Rex Mortimer (2011) mengkombinasikan kekuatan ideologi murni dan ideologi praktis yang menjadi kontribusi penting bagi kekuatan PKI memenangkan dukungan dan pengaruh selama periode Demokrasi Terpimpin.<sup>5</sup>

Ide Sukarno yang sangat menekankan pada masalah persatuan dapat dilihat dari sikapnya yang berhadapan dengan kaum federalis daerah-daerah di luar Jawa dan menggabungkan tradisi ideologi yang bertentangan. Sejak 1926 Sukarno sudah memiliki ide untuk menyatukan antara nasionalisme, Islam dan Marxisme dapat diwujudkan dalam politik praktis karena semuanya berakar pada perlawanan terhadap penindasan kolonial Belanda.<sup>6</sup> Kebijakan ini membuat siapapun dan partai manapun yang berani bersebrangan dengan Presiden Sukarno mempunyai konsekuensi masuk penjara dan partainya dibubarkan. Dzulfikridin (2010) menunjukkan tokoh-tokoh politik seperti Mohammad Roem, Prawoto Mangku Sasmito, M.Yunan Nasution, HAMKA, M. Isa Anshary, E.Z. Muttaqien, Kasman Singodimedjo, H.M. Ghazali

---

*Indonesia dalam Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia.*(Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2013), h.1.

<sup>2</sup> Arta, Sedana dan Margi. *Sejarah Indonesia dari Proklamasi Sampai Orde Baru.* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h.139.

<sup>3</sup> Asvi Varman Adam. *Militerisasi Sejarah Indonesia: Peran A.H.Nasution. dalam Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia.*(Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2013), h.1.

---

<sup>4</sup> Her Suganda. *Jejak Soekarno di Bandung (1921-1934).* (Jakarta: Kompas, 2015), h.71.

<sup>5</sup> Rex Mortimer. *Indonesian Communism Under Sukarno Ideologi dan Politik 1959-1965.* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h.8.

<sup>6</sup> Weringa, Saskia E. *Penghancuran Gerakan Perempuan Politik Seksual di Indonesia Pascakejatuhan PKI.* (Yogyakarta: GalangPress, 2010), h.170.

Sjahlan, Kyai A. Mukti, H.M. Sholeh Iskandar, Anwar Harjono, dan Yusuf Wibisono merasakan dinginnnya penjara karena sebagai anggota Masyumi dengan tegas menentang politik Demokrasi Terpimpin.<sup>7</sup> Tindakan lainnya adalah menyederhanakan jumlah partai politik dari 60 partai menjadi 11 partai politik<sup>8</sup>

Tindakan Presiden Sukarno yang tegas dan keras pada lawan-lawan politiknya menyebabkan dia oleh para pengkritiknya dianggap mempraktekkan kediktatoran Kepemimpinan Presiden Sukarno dalam Demokrasi Terpimpin berakhir ketika pasca pemberontakan Gerakan 30 September 1965 dengan akronim GESTAPU (gerakan September 30) menurut versi pemerintah Orde Baru, namun Sukarno menyebutnya Gestok atau Gerakan 1 Oktober.<sup>9</sup>

### Metode

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan metode kesejarahan. Menurut Gottschalik, 1985:32)<sup>10</sup> langkah-langkah dalam penelitian sejarah terdiri dari empat tahap, meliputi: (1) heuristik, (2) kritik, (3) interpretasi, (4) historiografi. Heuristik adalah mencari jejak-jejak sejarah yang berkaitan dengan pemikiran Sukarno tentang Demokrasi Terpimpin tahun 1959-1966. Pada penelitian ini digunakan sumber primer maupun sumber sekunder. Sumber primer diperoleh dari dokumen atau buku yang ditulis oleh pelaku sejarah atau orang yang hadir pada peristiwa sejarah, sedangkan sumber sekunder diperoleh berupa buku penunjang yang

ditulis oleh siapapun yang menyangkut tentang Demokrasi Terpimpin. Langkah kedua adalah kritik yang terdiri dari kritik internal dan eksternal, dengan Langkah ini peneliti memperoleh fakta-fakta sejarah dari data-data yang telah diseleksi dan dibandingkan. Langkah ketiga adalah melakukan interpretasi, dengan menetapkan makna yang saling berhubungan antara fakta-fakta sejarah yang telah dihimpun. Fakta-fakta sejarah tersebut dirangkai dan dihubungkan menjadi suatu cerita sejarah yang sistematis dan logis mengenai pemikiran Sukarno terkait Demokrasi Terpimpin, selanjutnya pemimpin menafsirkan substansi dari gagasan-gagasan yang dikemukakannya. Langkah terakhir adalah historiografi, pada aspek ini penulis menyajikan hasil interpretasi dari fakta-fakta sejarah sehingga menjadi kisah yang kronologis, selaras dan mudah dipahami dan dapat dibuktikan kebenarannya

### Pembahasan

#### Latar Belakang Lahirnya Demokrasi Terpimpin

Situasi politik masa demokrasi parlementer menjadi alasan yang kuat yang mendorong diberlakukannya demokrasi terpimpin oleh Presiden Sukarno. Demokrasi Parlementer atau Demokrasi Liberal menurut pandangan Sukarno tidak sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia. Alasan yang dikemukakan adalah demokrasi liberal hanya membuat ketidakstabilan politik di kabinet dan parlementer.<sup>11</sup> Ketidakstabilan politik terjadi karena Demokrasi Parlementer dengan UUDS 1950 memiliki dua kelemahan pokok yakni dalam parlemen Indonesia tidak ada mayoritas yang menguasai separoh kursi DPR, sehingga koalisi yang dibangun rentan mengalami perpecahan di tengah jalan. Pasca pemilu

<sup>7</sup> Dzulfikriddin, M. Natsir, *Mohammad Dalam Sejarah Politik Indonesia Peran dan Jasa Mohammad Natsir dalam Duo Orde Indonesia*. (Bandung: Mizan, 2010), h.149.

<sup>8</sup> Pitono, Joko. *Soekarno Obor Indonesia yang Tak Pernah Padam*. (Surabaya: Grammatical Publishing, 2015), h.235.

<sup>9</sup> Ongkhokham. *Sukarno, Orang Kiri, Revolusi & G30S 1965*. (Jakarta: Komunitas Bambu, 2013), h.153.

<sup>10</sup> Gottschalik, L. *Mengerti Sejarah*. (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1985), h.32.

<sup>11</sup> Indrajat, Himawan. *Demokrasi Terpimpin Sebuah Konsepsi Soekarno Tentang Demokrasi* (SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, volume 18, No.1, 2016), hh.53-62. DOI: <https://doi.org/10.23960/sosiologi.v18i1>

tahun 1955 tepatnya tanggal 29 September 1955 memilih anggota DPR dan 15 Desember 1955 memilih anggota konstituante, terbentuk koalisi besar antara PNI, Masyumi, NU. Koalisi ini rentan mengalami perpecahan sehingga umur kabinet antara 6 bulan sampai 2 tahun. Akibatnya kabinet tidak fokus pada program pembangunan. Keadaan dapat dicermati pada masa Kabinet Ali Sastroamijoyo II (20 Maret 1956-4 Maret 1957) yang mempunyai program pembangunan repelita, perjuangan pengembalian Irian Barat, pembentukan daerah-daerah otonomi, dan mempercepat terbentuknya anggota DPRD, mengusahan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai, menyehatkan perimbangan keuangan negara, mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional berdasarkan kepentingan rakyat. Keadaan politik yang membuat kabinet ini mengembalikan mandat adalah berkobarnya semangat anti Cina, munculnya sparatisme dengan pembentukan dewan militer seperti Dewan Banteng di Sumatera Tengah, Dewan Gajah di Sumatera Utara, Dewan Garuda di Sumatera Selatan, Dewan Lambung Mangkurat di Kalimantan Selatan, dan Dewan Manguni di Sulawesi Utara. Pusat dianggap mengabaikan pembangunan daerah, pembatalan KMB menyebabkan pengusaha Belanda menjual perusahaannya pada orang Cina, ditambah lagi perpecahan antara PNI dan Masyumi.<sup>12</sup> Pemberontakan PRRI-PERMESTA menurut Suryanegara (2010) pemberontakan ini terjadi karena belum terbinanya satu wawasan nasional diantara pimpinan militer dan partai politik.<sup>13</sup> Lebih lanjut Maulida (2018) memberikan penjelasan bahwa pergolakan yang melibatkan PRRI-Permesta pada awalnya merupakan sikap yang diambil oleh para perwira militer daerah setelah melihat

berbagai ketidakberesan pemerintah pusat dalam mengurus pemerintahan. Sikap itu dipicu oleh keputusan pemerintah yang melakukan perampangan di tubuh TNI sehingga sebagian pasukan harus gantung senjata, dan menimbulkan kekecewaan bagi mereka yang selama masa Revolusi turut berjuang mempertahankan Republik. Ditambah lagi, melihat kisruh politis di pusat yang tidak memberi dampak positif ke daerah, para perwira politikus di daerah bergerak untuk melakukan pembagunan daerah. Itu jelas tampak dalam tuntutan mereka kepada pemerintah pusat mengenai pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan transparan.<sup>14</sup> Pemberontakan ini semakin berbahaya karena melibatkan Amerika Serikat dan Australia dalam pemberontakan PRRI-PERMESTA karena kekhawatiran terhadap pengaruh Komunis di Indonesia serta peningkatan kualitas dan kuantitas persenjataan ABRI dianggap sebagai ancaman bagi Australia dan sekutunya<sup>15</sup>

Pemberontakan PRRI-Permesta juga menarik perhatian dan dukungan dari tokoh-tokoh politik Masyumi seperti Mohamad Natsir, Mantan Perdana Menteri Burhanuddin Harahap, Ahli Ekonomi dan anggota PSI Sumitro Joyohadikusumo.<sup>16</sup> Sebelum pemberontakan PRRI-Permesta terjadi upaya pembunuhan terhadap Presiden Sukarno yang dikenal dengan nama Peristiwa Cikini yang terjadi tanggal 30 November 1957, walaupun Sukarno selamat namun terdapat siswa-siswa yang luka-luka dan meninggal dunia, peristiwa ini menyebabkan stabilitas politik nasional

<sup>12</sup> Arta, Sedana dan Margi, *op. cit.*, h.134.

<sup>13</sup> Suryanegara, Ahmad Mansyur. *Api Sejarah 2*. (Bandung: Salamadi Pustaka Semesta, 2010), h.377.

<sup>14</sup> Maulida, Faishal Hilmy. Hitam Putih PRRI-Permesta: Konvergensi Dua Kepentingan.(Paradigma Jurnal Kajian Budaya Vol. 8 No. 2, 2018), hh. 174–185. DOI: 10.17510/paradigma.v8i2.180

<sup>15</sup> Soebadio, Hadi. *Keterlibatan Australia dalam Pemberontakan PRRI-PERMESTA*.(Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2022), h.189

<sup>16</sup> Elson, R.E. *The Idea of Indonesia Sejarah Pemikiran dan Gagasan*. (Jakarta:Serambi, 2009), h.295.

menjadi terguncang.<sup>17</sup> Aspek politik lainnya yang memicu diberlakukannya Demokrasi Terpimpin adalah gagalnya Konstituante membuat UUD yang baru. Titik buntu tersebut terjadi karena ada pertarungan yang sengit antara tiga pihak, yakni pihak Masyumi dan Islam lainnya yang menentang Pancasila sebagai dasar negara dan menghendaki Islam sebagai dasar negara, kaum nasionalis dan PKI menghendaki Pancasila sebagai dasar negara. Sedangkan PSI dan MURBA menghendaki sosio ekonomi sebagai dasar negara.<sup>18</sup>

Ajakan Presiden Sukarno dalam sidang Konstituante tanggal 22 April 1959 agar Konstituante memberlakukan kembali UUD 1945 juga menemui jalan buntu. Blok Islam memberikan tawaran mau menerima UUD 1945 asalkan ada amandemen dengan mengembalikan kata-kata “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” ke dalam pembukaan UUD 1945. Usul ini ditolak dalam sidang konstituante pada tanggal 29 Mei 1959 dengan perbandingan 201 setuju dan 265 menolak. Barulah tanggal 30 Mei 1959 dilakukan pemungutan suara terhadap usulan pemerintah Kembali ke UUD 1945 tanpa perubahan dengan suara 269 setuju dan 199 menolak, namun jumlah anggota Konstituante tidak kuorum karena dihadiri kurang dari 2/3 seperti yang diatur dalam pasal 37 UUDS 1950 dan sesuai ketentuan diadakan pemungutan suara dua kali lagi dan pemungutan suara terakhir tanggal 2 Juni 1959 namun mengalami kegagalan juga.<sup>19</sup>

Untuk mencegah ekses-ekses negatif politik akibat ditolaknya usulan pemerintah oleh konstituante, maka Kepala Staf Angkatan Darat Letnan Jenderal A.H

Nasution atas anama pemerintah/Penguasa Perang Pusat (Peperpu) mengeluarkan peraturan No. Prt/Perpepu/040/1959 tentang larangan mengadakan kegiatan-kegiatan politik, yang berlaku mulai tanggal 3 Juni 1959 pukul 06.00. Ketua Umum PNI Suwirjo mengirimkan surat pada Presiden Sukarno yang pada saat itu sedang mengadakan kunjungan kenegaraan ke Jepang yang berisi agar Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden untuk kembalinya UUD 1945. Tanggal 29 Juni 1959 saat Kembali ke tanah air presiden mengadakan pertemuan dengan beberapa tokoh politik, beberapa Menteri, dan pimpinan Angkatan Perang, maka tanggal 5 Juli 1959 Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang isinya pembubaran konstituante, berlakunya Kembali UUD 1945 dan pembentukan MPRS dan DPAS.<sup>20</sup>

Dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 mendapat dukungan dari partai-partai politik, ABRI dan MA, karena dianggap sudah memenuhi syarat keadaan dikeluarkannya suatu dekrit. Hal itu senada dengan pendapat Danang Risdiarto yang mengutip Jimly Ashididjie bahwa dekrit hanya dapat dikeluarkan dalam tiga keadaan. *Pertama*, negara dalam situasi perang dimana segalanya menjadi darurat dan diperbolehkan membuat peraturan yang melanggar hukum sebelumnya. *Kedua*, negara dalam kekacauan dan dekrit dikeluarkan untuk menghentikan kekacauan tersebut. *Ketiga*, yang memungkinkan dikeluarkannya dekrit adalah fungsi-fungsi kenegaraan dalam keadaan darurat. Dalam kondisi ini dapat dikeluarkan peraturan dalam bentuk Perppu untuk mengatasi keadaan ini.<sup>21</sup>

### Politik Sukarno

<sup>17</sup> Suroso, *Suar.Akar dan Dalang Pembantaian Manusia Tak Berdosa dan Penggulingan Bung Karno*.(Bandung:Ultimus, 2013), h.176

<sup>18</sup> *Ibid.*, h.178.

<sup>19</sup> Marwati Joened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto. *Sejarah Nasional Indonesia VI Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka,2008), h.381.

<sup>20</sup> *Ibid.*, h.384-385.

<sup>21</sup> Danang Risdiarto. *Legalitas Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan Pengaruhnya Bagi Perkembangan Demokrasi di Indonesia*. (Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 15 No. 01 - Maret 2018), hh. 59 – 68.

Selama periode Demokrasi Terpimpin, Sukarno, PKI dan militer adalah tiga kekuatan politik utama. Politik luar negeri Indonesia lebih militan antikolonial anti antip Barat, yang secara tidak langsung Indonesia bersekutu dengan negara-negara komunis dan sosialis. Terdapat symbiosis mutualisme antara militer dan Presiden Sukarno, militer membutuhkan Sukarno untuk keabsahannya, sementara Sukarno memerlukan militer untuk menekan kekuatan oposisi. Dalam mengurangi ketergantungannya pada militer, Sukarno membina angkatan Udara dan PKI.<sup>22</sup>

Politik Sukarno yang merangkul PKI tidak bisa dilepaskan dari cita-citanya menyatukan tiga pilar kekuatan yang dikenal dengan nama politik NASAKOM (nasionalis, agama dan komunis). Ide itu sudah ada sejak zaman pergerakan nasional<sup>23</sup>. Ide tersebut dapat direalisasikan ketika demokrasi terpimpin terlaksana. Pada masa ini kekuasaan Presiden Sukarno sangat besar, ia menjadi tokoh kunci dalam perpolitikan Indonesia. Hal ini dapat dianalisis dari usulan DPA agar pidato presiden tanggal 17 Agustus 1950 yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita tersebut dapat dijadikan GBHN yang berjudul Manifesto Politik Republik Indonesia disingkat Manipol.

Beberapa Tindakan Presiden Sukarno untuk memperlancar proses demokrasi terpimpin adalah membubarkan DPR hasil pemilu 1955 karena adanya penolakan RAPBN tahun 1960, sehingga presiden mengeluarkan Penetapan Presiden No.3 tahun 1960 yang menyatakan pembubaran DPR hasil pemilu 1955 yang dilanjutkan dengan Pembentukan DPRGR. Komposisi keanggotaan DPRGR dibicarakan di Istana Presiden Tampaksiring, Bali, Pembicaraan komposisi tersebut melibatkan PNI, NU,

OKI dan AD. Tata tertib anggota DPRGR ditetapkan dengan Peraturan Presiden No.24 Tahun 1960 dan Peraturan Presiden No.32 Tahun 1964.<sup>24</sup>

Pembentukan DPR GR sebagai hasil penunjukan Presiden Sukarno mendapat penolakan dari berbagai elemen politik, seperti penolakan oleh NU dengan tokoh Ro'is Aam, K.H.Wahab Chasbullah yang menyatakan NU tidak dapat duduk dengan PKI dalam satu kabinet NASAKOM dan menolak Kerjasama dengan PKI. Tokoh dari PNI sendiri seperti Mr. Sartono sebagai Ketua DPR hasil Pemilu 1955 dan Mr. Iskaq Tjokrodisuryo menunjukkan keprihatinannya serta menyatakan bahwa anggota DPRGR dari PNI bukan mewakili PNI. Tokoh Masyumi dan Bung Tomo dari Partai Rakyat Indonesia juga melakukan penolakan atas keputusan presiden.

Bahkan Sutomo beraksi keras dengan mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung melalui suratnya tanggal 22 Juni 1960 yang intinya menggugat Presiden Sukarno terhadap pelanggaran UUD 1945 dengan membubarkan DPR hasil Pemilu 1955, dan menuduh kabinet melakukan Tindakan sewenang-wenang, dengan mengemukakan fakta sebagai berikut

1. Paksaan untuk menerima Manipol dan Usdek, tanpa diberi tempo terlebih dahulu untuk mempelajarinya
2. Paksaan supaya diadakan Kerjasama antara golongan nasionalis, agama dan komunis
3. Paksaan pembongkaran Tugu Gedung Proklamasi di Pegangsaan Timur 56 Jakarta.

Tokoh-tokoh partai politik yang menentang pembentukan DPRGR kemudian membentuk suatu wadah yang dikenal dengan nama Liga Demokrasi yang diketuai oleh Imron Rosyadi dari NU dan tokoh-tokoh politik dari NU, Parkindo, Partai Katholik, Liga Muslimin, PSII,

<sup>22</sup> Leo Suryadinata. *Politik Luar Negeri Indonesia*. (Jakarta: LP3ES, 1998), h.38.

<sup>23</sup> Ingleson John. *Jalan ke Pengasingan Pergerakan Nasionalis Indonesia Tahun 1927-1934*(Jakarta:LP3ES, 1988), h.85.

<sup>24</sup> Panitia Buku 20 Tahun Indonesia Merdeka, 20 Tahun Indonesia Merdeka, 1965. h.597.

IPKI, dan Masyumi. Liga Demokrasi mengeluarkan pernyataan bersama antara lain: supaya dibentuk DPR yang demokratis dan konstitusional. Oleh sebab itu, hendaknya rencana pemerintah untuk membentuk DPRGR yang telah diumumkan oleh presiden hendaknya ditangguhkan. Adapun alasan-alasan yang dikemukakan oleh Liga Demokrasi adalah:

1. Perubahan perimbangan perwakilan golongan-golongan dalam DPRGR, memperkuat pengaruh dan kedudukan suatu golongan tertentu yang mengakibatkan kegelisahan memungkinkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan
2. DPR yang demikian, pada akhirnya adalah DPR yang akan mengiyakan sehingga tidak dapat menjadi soko guru negara hukum dan demokrasi yang sehat.
3. Pembaruan dengan cara pengangkatan sebagaimana yang dipersiapkan itu adalah bertentangan dengan asas-asas demokrasi yang dijamin oleh undang-undang.

Namun usaha-usaha yang dilakukan Liga Demokrasi mengalami kegagalan karena Presiden Sukarno setiba dari lawatannya dari luar negeri melarang keberadaan Liga Demokrasi. Untuk memperkuat Demokrasi Terpimpin maka Presiden Sukarno membentuk suatu badan yang dikenal dengan nama Front Nasional yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Presiden No.13 tahun 1959. Dalam penetapan tersebut dijelaskan bahwa Front Nasional adalah suatu organisasi masa yang memperjuangkan cita-cita proklamasi dan cita-cita yang terkandung dalam UUD 1945 dan diketuai oleh Presiden Sukarno.

Politik kekuasaan Presiden Sukarno bertambah besar mengacu pada Keputusan Presiden N0.94 tahun 1962 dengan mengintegrasikan Lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara dengan eksekutif. MPRS, DPRGR, DPA,

Makamah Agung dan Dewan Perancang Nasional/Dapernas yang dipimpin langsung oleh Presiden. Tindakan presiden ini bisa dianggap sebagai penyimpangan terhadap UUD 1945 karena dalam prakteknya ketua lembaga-lembaga tersebut diangkat menjadi Menteri dan ikut serta dalam sidang-sidang cabinet yang selanjutnya ikut merumuskan dan mengamankan policy pemerintah dalam Lembaga masing-masing.<sup>25</sup>

Setelah politik konsolidasi berhasil, maka politik untuk memperjuangkan Kembali Irian Barat Kembali gencar dilakukan terutama pendekatan pada Blok Timur karena sebelumnya barat kurang memberikan respon terhadap perjuangan pengembalian Irian Barat kepangkuan Ibu pertiwi. Pendekatan pada Blok Timur berhasil dengan adanya bantuan militer dari Moskow. Keadaan ini membuat Belanda terkepung karena ABRI telah melancarkan taktik infiltrasi ke Irian Barat dengan persenjataan standar NATO dan untuk menghindari malu (a face saving gesture) maka Belanda terpaksa mau berunding dengan Indonesia yang melahirkan persetujuan New York dan adanya kesepakatan untuk menentukan masa depan Irian barat dengan mengadakan pepera.<sup>26</sup>

Setelah masalah Irian barat selesai maka politik luar negeri Indonesia tetap militant, hal ini dibuktikan dengan Tindakan presiden yang membagi dunia ini menjadi Nefos (*New Emerging Force*) dan Oldefos (*Old Established Forces*) dimana barat adalah bagian dari Oldefos. Presiden Sukarno mengelompokan negara-negara komunial dan beberapa negara baru di Asia dan Afrika dalam kategori Nefos. Tindakan lainnya yang membuat Indonesia menjado sorotan adalah Tindakan konfrontasi

<sup>25</sup> Poesponegoro dan Notosusanto. *Sejarah Indonesia VI Zaman Jepang dan Zaman republic Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2008). h.423.

<sup>26</sup> Suryadinata. *Politik Luar Negeri di Bawah Suharto*. (Jakarta:LP3ES, 1998), h.39.

terhadap pembentukan Federasi Malaysia yang dianggap Sukarno sebagai neokolonialisme barat. Politik konfrontasi Sukarno juga disebabkan kecurigaannya pada pangkalan militer barat di Singapura yang pernah mendukung pemberontakan PRRI dan Permesta. Tindakan konfrontasi Sukarno didukung oleh militer dan PKI. Militer mendukung dengan alasan kekhawatiran dengan politik pengepungan Indonesia oleh Malaysia, sementara PKI mendukung dengan alasan untuk pembentukan Angkatan V yang terdiri dari kaum buruh dan petani yang dipersenjatai.

Politik luar negeri Sukarno yang agresif Nampak pula dari keluarnya Indonesia dari keanggotaan PBB tahun 1965 karena memprotes atas masuknya Malaysia sebagai anggota tidak tetap di DK PBB. Untuk menandingi eksistensi PBB maka presiden Sukarno membentuk suatu badan yang disebut CONEFO (Conference of New Emerging Force) yang didukung oleh RRC, Korut, Vietnam Utara sehingga terbentuk poros Jakarta- Peking- dan-Hanoi dan Pyongyang markas besarnya di Jakarta. POLITIK luar negeri Indonesia zaman Demokrasi Terpimpin menyebabkan pemborosan devisa negara dan menimbulkan inflasi yang tidak terkontrol mencapai 500%. Politik dengan permainan keseimbangan antara militer dan PKI, namun terlalu memberi angin pada PKI menyebabkan keseimbangan itu ambruk dengan meletusnya pemberontakan PKI tahun 1965.

### Simpulan

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dilatarbelakangi oleh keadaan negara yang kacau akibat dari keadaan politik yang terjadi pada masa demokrasi liberal yang menimbulkan ketidakstabilan politik yang ditandai adanya berbagai pemberontakan seperti PRRI dan Permesta yang ternyata didukung oleh kekuatan militer Barat serta adanya penolakan terhadap gagasan presiden untuk kembali ke UUD 1945. Politik luar negeri Indonesia sebelum Orde

Baru dicirikan dengan nasionalisme yang kuat dan peran yang dominan dari para pemimpin sekuler dibandingkan dengan pemimpin Islam. Para pemimpin Indonesia yang telah berkompromi dengan nasionalisme Indonesia tidak dapat bertahan dan politik luar negeri Indonesia yang militant bersama berjalannya waktu. Ini terjadi karena Tindakan Presiden Sukarno untuk mengalihkan masalah-masalah dalam negeri ke persoalan-persoalan internasional. Bangkitnya PKI dan kelompok-kelompok sayap kiri hanya mendorong Indonesia menjalankan politik luar negeri yang agresif, anti barat dan curiga dengan kekuatan barat

### Daftar Pustaka

- Henk Schulte Nordholt, Bambang Purwanto, dan Ratna Saptari. *Memikir Ulang Historiografi Indonesia dalam Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia*.(Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2013), h.1.
- Arta, Sedana dan Margi. *Sejarah Indonesia dari Proklamasi Sampai Orde Baru*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h.139.
- Asvi Varman Adam. *Militerisasi Sejarah Indonesia: Peran A.H.Nasution. dalam Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia*.(Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2013), h.1.
- Her Suganda. *Jejak Soekarno di Bandung (1921-1934)*. (Jakarta: Kompas, 2015), h.71.
- Rex Mortimer. *Indonesian Communism Under Sukarno Ideologi dan Politik 1959-1965*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h.8.
- Gottschalik, L. *Mengerti Sejarah*.(Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1985), h.32.

- Weringa, Saskia E. *Penghancuran Gerakan Perempuan Politik Seksual di Indonesia Pascakejatuhan PKI*. (Yogyakarta: GalangPress, 2010), h.170.
- Dzulfikriddin, M. Natsir, Mohammad Dalam Sejarah Pokitik Indonesia Peran dan Jasa Mohammad Natsir dalam Duo Orde Indonesia. (Bandung: Mizan, 2010), h.149.
- Pitono, Joko. Soekarno Obor Indonesia yang Tak Pernah Padam. (Surabaya: Grammatical Publishing, 2015), h.235.
- Onghokham. Sukarno, Orang Kiri, Revolusi & G30S 1965. (Jakarta:Komunitas Bambu, 2013), h.153.
- Suroso, Suar. *Akar dan Dalang Pembantaian Manusia Tak Berdosa dan Penggulingan Bung Karno*. (Bandung:Ultimus, 2013), h.176
- Suryanegara, Ahmad Mansyur. *Api Sejarah 2*. (Bandung: Salamadi Pustaka Semesta, 2010), h.377.
- Maulida, Faishal Hilmy. *Hitam Putih PRRI-Permesta: Konvergensi Dua Kepentingan*. (Paradigma Jurnal Kajian Budaya Vol. 8 No. 2, 2018), hh. 174–185. DOI: 10.17510/paradigma.v8i2.180
- Soebadio, Hadi. *Keterlibatan Australia dalam Pemberontakan PRRI/PERMESTA*. (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2022), h.189
- Elson, R.E. *The Idea of Indonesia Sejarah Pemikiran dan Gagasan*. (Jakarta:Serambi, 2009), h.295.
- Panitia Buku 20 Tahun Indonesia Merdeka, 20 Tahun Indonesia Merdeka*, 1965. h.597.
- Danang Risdiarto. *Legalitas Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan Pengaruhnya Bagi Perkembangan Demokrasi di Indonesia*. (Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 15 No. 01 - Maret 2018), hh. 59 – 68.
- Leo Suryadinata. *Politik Luar Negeri Indonesia*. (Jakarta: LP3ES, 1998), h.38.
- Ingleson John. *Jalan ke Pengasingan Pergerakan Nasionalis Indonesia Tahun 1927-1934* (Jakarta:LP3ES, 1988), h.85.